

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFASTRUKTUR MELALUI PROGRAM SAMISADE TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CIAWI

Anisa Cikal Febrianti¹, Abubakar Iskandar², Rusliandy³
^{1,2,3}Magsiter Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Indonesia
anisa.cikal.febrianti@unida.ac.id¹, abu1958@yahoo.com²,
rusliandy1980@gmail.com³

ABSTRAK

Tujuan penelitian yakni untuk menganalisis implementasi kebijakan melalui program SAMISADE dan untuk mengetahui respon kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ciawi. Penelitian berikut sebagai penelitian kualitatif berjenis mixed methode antara kualitatif dan kuantitatif dengan analisis teori Merille S. Grindle untuk lebih menggali data yang dibutuhkan juga digunakan pengukuran survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Hasil penelitian menunjukkan program SAMISADE tahun 2021 sudah terselesaikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan pengajuan desa. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Ciawi sebanyak 13 desa sudah melaksanakan pembangunan infrastruktur jumlah 20 titik lokasi pembangunan. Kondisi kontur tanah di Kecamatan Ciawi yang dominan berupa tebingan maka dana pembangunan SAMISADE lebih banyak terserap untuk pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT), hal ini berfungsi dalam menstabilkan kondisi tanah. Namun terdapat beberapa kendala diantaranya dari sisi pengawasan SAMISADE tahun 2021 belum adanya pengawasan sama sekali dalam proses berjalannya pembangunan. Selanjutnya peraturan program yang berjalan pada tahun 2021, dinilai masih belum sama pemahaman masyarakat dengan regulasi yang sudah ada. Dari sisi kepuasan masyarakat terhadap program ini dihitung berdasarkan pengukuran (IKM) diperoleh hasil skor dengan angka Indeks sebesar 91,23 yang artinya dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik). Unsur nilai Rata-Rata(NRR) tertinggi merupakan unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, (3,737). NRR terendah merupakan penanganan pengaduan, saran dan Masukan (3,535). Penilaian masyarakat pada umumnya baik, dilatarbelakangi oleh terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pembangunan infrastruktur di desa-desa Kecamatan Ciawi.

Kata Kunci: **SAMISADE, Implementasi, Kebijakan, Infrastruktur, Indeks Kepuasan**

ABSTRACT

The purpose of research to analyze the implementation from policies through the SAMISADE program and to find out the response of community satisfaction towards infrastructure development in Ciawi District. This is qualitative research with a mixed method type between qualitative and quantitative with Merille S. Grindle's theoretical analysis. The study results show that the 2021 SAMISADE program has completed infrastructure development by village proposals. Infrastructure Development in Ciawi District, as many as 13 villages have completed infrastructure development in 20 construction locations. The condition of the dominant land contour in the Ciawi Subdistrict is in the form of cliffs, so more SAMISADE development funds

were absorbed for constructing a Land Retaining Wall (TPT); this function is to stabilize soil conditions. However, there are several obstacles, including from the supervision side of SAMISADE in 2021; there needs to be more supervision in the ongoing development process. Furthermore, the program regulations that will run in 2021 it is considered that the public needs to understand the same as the existing regulations. From the point of view of community satisfaction with this program, it is calculated based on measurement (IKM) with a score obtained with an index number of 91.23, which means service quality A (Very Good). The element of the highest average value (NRR) is the element of Product Specification Type of Service (3.737). The lowest NRR is handling complaints, suggestions, and feedback (3.535). Community ratings are generally good, motivated by the fulfillment of community needs for infrastructure development in the villages of the Ciawi District.

Keywords: SAMISADE, Implementation, Infrastructure, Satisfaction Index

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur makin berkembang, melalui pembangunan yang memadai tentu akan berdampak jangka panjang dalam membangun masa depan. Pembangunan ini diharapkan dapat memberikan stimulus Bergeraknya beragam aktivitas di masyarakat dan tercipta konektivitas yang kuat antarwilayah. Dalam pengerjaannya manusia sebagai pelaksana pembangunan sekaligus sebagai objek sasaran dari proses pembangunan tersebut (Digdowiseiso, 2020). Sehingga dapat diketahui jika pembangunan sebagai aktivitas merubah lebih positif dengan cara usaha yang sesuai perencanaan yang berguna bagi masa yang akan datang (Wahab, 2015). Infrastruktur sendiri merupakan suatu elemen kota yang mengacu pada sistem secara fisik untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti transportasi umum, air, bangunan, serta fasilitas publik lain (Setiawan, 2018). Maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu bagian peradaban manusia masa kini yang senantiasa dikembangkan untuk menunjang aktifitas kegiatan sehari-hari.

Dalam suatu masyarakat diperlukan suatu pengelolaan yang terencana dengan baik agar tujuan hidup dapat tercapai (Iskandar, 2007). Pada pembangunan infrastruktur desa Implementasi dari kebijakan yang ada berdasar pada bentuk program yang menjadi proyek beberapa kegiatan pelaksanaan (Nugroho, 2016). Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah, dan dalam rangka pemenuhan tuntutan yang makin beragam. Penyelesaian dan pengendalian ini bisa dilaksanakan dengan mengevaluasi kebijakan implementasi (Rusliandy, 2022). Kepuasan masyarakat terhadap program yang ada berkaitan dengan hubungan kepercayaan masyarakat. Harbani Pasolong menjelaskan makin bagus pemerintahan dan layanan berkualitas dapat menyebabkan kepercayaan yang tinggi (high trust)".

Kepercayaan ini dapat bertambah jika masyarakat dilayani dengan baik dan diberikan layanan yang memuaskan (Harbani Pasolong, 2010). Dalam tahapan

kebijakan publik, implementasinya kebijakan publik sebagai tahap penting dan harus dijalankan untuk mendapatkan hasil kebijakannya. Tentunya pada tahap implementasi diperoleh variabel terkait dengan kesuksesan implementasi tersebut agar dapat mempermudah dalam proses revisi tahapan implementasinya (Abdussamad et al., 2022).

Keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan dijelaskan oleh Merilee S. Grindle bahwa mendapat pengaruh dari isi kebijakan dan lingkungan implementasinya (AG, 2011). Pelayanan publik sebagai dasar pemerintah menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik sebab menjadi faktor utama praktik tata pengelolaan di Indonesia. Konteks pelayanan ini merupakan pelayanan umum yang memprioritaskan kepentingan umum, memudahkan pelayanan, dan memuaskan publik (Sari & Mardhiah, 2022). Di sisi lain mengemukakan bahwa, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, setidaknya instansi pemerintahan sebagai pelaksana pelayanan harus memiliki 4 item pembentuk layanan publik, di antaranya: Pemberi layanan, penerima layanan, bentuk layanan dan feedback balik positif yang diberikan oleh objek layanan sebagai bentuk respon dari kepuasan layanan yang telah diberikan (Tanjung & Fadhly, 2022).

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk pembangunan infrastruktur yakni pada Program Program SAMISADE (Satu Miliar Satu Desa) sebagai Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa agar terdapat pembangunan desa bisa transparan. Dari aspek regulasi program ini disusun dalam Perbup Bogor No. 100 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa yang disahkan pada 1 November 2021. Fasilitas Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa ini dimaksudkan sebagai stimulan bagi masyarakat desa untuk lebih mempercepat pembangunan infrastruktur desa agar dapat mendorong dan mendukung terwujudnya kemandirian desa.

Program SAMISADE semestinya dapat berjalan pada tahun 2019 namun karena berbagai pertimbangan yang diperlukan kajian dari segi hukum serta anggaran sehingga baru bisa berjalan pada tahun 2021 dengan anggaran Rp. 372 miliar untuk 415 desa. Program Pembangunan melalui SAMISADE bukan hanya untuk infrastruktur jalan, antara lain untuk irigasi, TPT (Tembok Penahan Tanah), Saluran Irigasi serta menara seluler. Dalam pengerjaannya melibatkan masyarakat desa sehingga dapat dirasakan warga yang ikut membangun secara merata. Cakupan wilayah dari Kabupaten Bogor yang mendapat bantuan program SAMISADE adalah desa-desa yang ada di Kecamatan Ciawi yang berjumlah 13 Desa. Pada tahun 2021 keseluruhan jumlah Desa tersebut sudah mengajukan program SAMISADE dan sebagian sudah terealisasi pembangunannya.

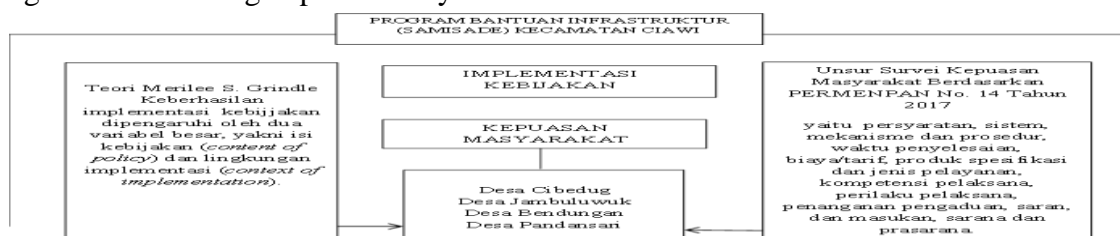
Namun ditemukan terdapat persoalan di Desa yang ada di Kecamatan Ciawi yakni robohnya konstruksi tembok penahan tanah (TPT) yang dibangun dari program SAMISADE tahun 2021 di Desa Bendungan. Kasus serupa juga ditemukan

pembangunan TPT roboh di Desa Galuga Cibungbulang. Adanya permasalahan pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari program SAMISADE dimungkinkan kurangnya pengawasan dari sisi perencanaan, penggunaan anggaran hingga pendampingan teknis konstruksi. Disisi lain, ada indikasi pengerjaan SAMISADE tahun 2021 di Desa Bendungan dikerjakan pihak ketiga oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tanpa melakukan lelang secara resmi, sehingga kuantitas anggaran berkurang yang berujung terhadap terjadinya pengurangan kualitas pembangunan. Sedangkan dalam informasi sumber media lain ditemukan bahwa program SAMISADE pembangunan jalan di Desa Cibedug Kecamatan Ciawi tidak berjalan sesuai dengan yang dicanangkan karena dibangun di kawasan yang tidak ada pemukiman warga.

Pada permasalahan tersebut, terlihat bahwa adanya kesalahpahaman dalam membangun infrastruktur dari segi penggunaan lahan untuk pembangunan. Program SAMISADE dikhususkan untuk membangun di lahan milik desa, dijelaskan dalam Juknis SAMISADE bahwa prioritas jenis kegiatan yang didanai oleh bantuan infrastruktur desa adalah jalan desa. Maka akan menjadi penyimpangan jika program pembangunan tersebut digunakan pada jalan perseorangan.

Untuk itu dalam penelitian ini akan menelaah lebih tentang implementasi kebijakan pembangunan melalui program SAMISADE di Kecamatan Ciawi. Idealnya dengan bantuan dana yang besar maka pembangunan bisa sukses, tetapi perlu dikaji lebih dalam apakah program ini benar sudah dirasakan oleh masyarakat, serta tepat sasaran sehingga dengan terbangunnya infrastruktur masyarakat juga mendapat penghasilan, pemberdayaan ekonomi dan menunjang sektor riil yang diharapkan lebih maju kedepannya.

Implementasi kebijakan dimulai melalui keputusan dan diwujudkan dalam tindakan berupa program-program yang dirumuskan dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Program SAMISADE perlu dilakukan analisis secara mendalam Untuk mengetahui sejauh mana implementasi tersebut dalam menganalisis implementasi Kebijakan SAMISADE. Sedangkan untuk Indikator Survei Kepuasan Masyarakat Berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, digambarkan kerangka pemikiran yaitu:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Dapat disimpulkan jika penelitian berikut untuk menganalisis implementasi kebijakan melalui program SAMISADE dan untuk mengetahui respon kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ciawi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian berikut yaitu kualitatif agar lebih menggali data untuk pengukuran survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat secara kuantitatif. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif mixed antara kualitatif dengan kuantitatif (R. & Maesaroh, 2014). Dalam penelitian ini pada tahap pertama peneliti mengumpulkan dan menganalisis implementasi kebijakan pada program SAMISADE menggunakan data kualitatif. Selanjutnya untuk menggambarkan fenomena dan hasil temuan dilapangan selain menggunakan wawancara didukung juga dengan membagikan angket IKM. IKM merupakan perolehan data informasi dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif terkait kepuasan masyarakat yang diperoleh hasil dari pendapat masyarakat untuk memperoleh layanan dari pelayanan publik (Kependudukan et al., 2020).

Penentuan informan dengan teknik purposive sampling. Menurut (Sugiyono, 2016) yaitu menentukan sampel yang memiliki tujuan dan dipertimbangkan. Informan kunci pada penelitian ini yaitu Camat dan Sekretaris kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, dan informan pendukung yaitu Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Kasi Ekbang), Unit Pelaksana Teknis (UPT) PUPR yang juga merupakan tim verifikasi Wilayah di 4 Kecamatan yaitu Ciawi, Megamendung, Cisarua, Caringin. Kepala Desa, Badan Pengawas Desa (BPD), serta Kasi/Kabid dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang menangani SAMISADE. Analisis data meliputi mereduksi, menyajikan, menyimpulkan penelitian serta triangulasi (Wahab, 2015).

Berdasarkan pada hasil observasi pembangunan sudah dilaksanakan pada tahun 2021, dari jumlah 13 Desa di Kecamatan Ciawi terdapat 4 desa yang mendapat bantuan dana sebesar Rp.1 Milyar yaitu Desa Cibedug, Desa Jambuluwuk, Desa Bendungan dan Desa Pandansari yang berjumlah 9.748 populasi kepala keluarga. Teknik penentuan sampel menggunakan metode *Cluster Random Sampling* dikarenakan populasi yang cukup luas. Pada penyampelan jenis ini, populasi dibagi klaster. Maka dengan populasi masyarakat Desa Cibedug, Desa Jambuluwuk, Desa Bendungan dan Desa Pandansari 9.748 jumlah kepala keluarga diperoleh sampel sebanyak 99 orang. Khusus pengukuran IKM dilakukan sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2017 Nomor 14 yaitu diawali dengan mencari nilai rata-rata (NRR) yakni:

$$\text{Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N= Bobot Nilai Perunsur

Setelah diperoleh bobot NRR tertimbang dari tiap indikator, digunakan pada pengukuran indeks dengan rumus berikut:

$$\text{Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

Hasil yang diperoleh dikonversi dinilai dasar 25, yakni:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Selanjutnya interpretasi hasil indeks dikonversikan yakni:

Tabel 1. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 18 disebutkan bantuan keuangan untuk infrastruktur desa yaitu bantuan keuangan langsung dari pemerintah daerah yang dikhususkan untuk membiayai pembangunan desa, peningkatan atau rehabilitasi infrastruktur desa. Implementasi Kebijakan Pembangunan Melalui Program SAMISADE. Dimensi Implementasi dalam penelitian ini mengarah kepada teori Merilee S. Grindle: Isi kebijakan yakni muatan kebijakan berisi substansi dalam kebijakan publik: Kepentingan-kepentingan yang berpengaruh.

Dari segi kepentingan yang berpengaruh kecamatan ciawi selaku tim verifikasi penyelenggaraan program SAMISADE ini dalam proses pengajuannya diawali dengan musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) pertemuan ini menentukan titik pembangunan sebelum kemudian dibuat dalam bentuk proposal pengajuan dari desa. Setelah tahap itu selanjutnya ajuan tersebut akan masuk ke SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dan akan ada pengecekan di tingkat kabupaten sebelum proses penganggaran di Kabupaten sampai tahap pencairan. Dinas DPMD Kabupaten Bogor selaku dinas terkait pengelola regulasi program SAMISADE akan mengarahkan sejauh mana komitmen desa dalam menyelesaikan pekerjaan serta mengarahkan dalam hal pembangunan konstruksi, sehingga diperlukan tenaga ahli dalam hal ini UPT PUPR setempat yang mengarahkan spesifikasinya, serta titik-titik lokasi yang memang harus dikerjakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal ini dibuktikan berdasarkan dari hasil penelitian (Ramadhan & Paujiah, 2021) bahwa dari berbagai perusahaan besar yang ada. Tapi dalam masalah yang dihadapi masyarakat meliputi infrastruktur yang buruk dan memperlambat kegiatan ekonomi. Penyelesaian permasalahan berikut yakni dengan program SAMISADE dari pemerintah, dengan rencana program yang dapat mempermudah lalu lintas di daerah

tersebut dan manfaat lain misalnya menghubungkan jalan desa dan jalan kabupaten. Dari peristiwa ini, maka harus diawasi dan dibimbing dengan menerapkan ekonomi pembangunan.

Jenis manfaat yang diperoleh dari pengimplementasian program SAMISADE diantaranya yaitu membuka akses wilayah, hal ini dalam rangka kemudahan aksesabilitas masyarakat terutama tingkat pedesaan dalam peningkatan kualitas jalan Desa. Dalam bidang ekonomi misalnya akses masyarakat untuk ke sawah dan menjual hasil tani ke pasar dipermudah. Maka dengan akses jalan yang baik dapat juga memangkas rute yang dilewati. Derajat perubahan yang hendak dicapai. Pada program SAMISADE di Kecamatan Ciawi derajat perubahan yang ingin dicapai diantaranya:(1)Terbukanya akses wilayah; (2) Meningkatnya IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap pemerintah daerah;(3)Tanah disekitar lokasi menjadi lebih bernilai karena terbukanya akses jalan terutama pelebaran jalan dengan betonisasi maupun aspal; (4) Wilayah terpencil menjadi jalan utama yang bisa dilalui;(5) Penguatan tebingan untuk area wilayah berbukit.

Letak Pengambilan Keputusan

Pada letak pengambil keputusan kebijakan program SAMISADE di Kecamatan Ciawi masing-masing informan memiliki peran. Tim verifikasi Kecamatan Ciawi yang dipimpin oleh camat memverifikasi dari mulai penyampaian proposal, pencairan keuangan, pelaksanaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban. tim verifikasi kecamatan memiliki peran yang cukup besar. Dalam proses perencanaan, Camat dan tim verifikasi kecamatan akan mencermati usulan dalam melakukan verifikasi atas usulan desa. Kemudian camat menyampaikan rekapitulasi permohonan pengajuan kepada Kepala DPMD Kabupaten Bogor.

Selanjutnya Dinas PMD Kabupaten Bogor berperan dalam mengumpulkan data hasil verifikasi serta melaporkannya kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). UPT DPUPR memiliki peran teknis yang strategis pada kegiatan SAMISADE yaitu melakukan verifikasi administrasi, Verifikasi lapangan dan terakhir verifikasi teknis. Untuk Verifikasi Administrasi, pihak UPT Dinas PUPR juga memeriksa semua berkas dan proposal termasuk RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang. Kemudian Verifikasi lapangan, petugas UPT mengecek ke lapangan titik yang diajukan sesuai atau tidak dalam proposal. Dan terakhir Verifikasi Teknis yang tujuannya memberikan saran teknis atas kegiatan proyek yang sedang berjalan. Dalam hal ini PUPR memiliki 2 kaki yakni sebagai tim verifikasi dan kaki lainnya sebagai pelayan masyarakat terkait masalah infrastruktur atau unit pelaksana teknis tempat berkonsultasi bagi masyarakat.

Pelaksana Program

Pelaksana kebijakan program SAMISADE yaitu desa di Kec. Ciawi dengan sistem swakelola masyarakat, namun dalam swakelola tetap diperlukan tenaga ahli atau

konsultan yang paham tentang konstruksi dalam pembangunan. Dalam Program SAMISADE pihak desa boleh merekrut pelaksana tugas atau tenaga teknis di luar Dinas PUPR, sesuai amanat dalam Peraturan bupati selain itu di desa sudah dibentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Sumber daya yang digunakan Untuk mengimplementasikan program SAMISADE diantaranya yaitu: (1) Sumber daya manusia (SDM) diantaranya yaitu Tim verifikasi (Terdiri dari Kecamatan dan UPT PUPR) serta TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) terdiri dari 2 unsur 1 perangkat desa 1 lembaga permasyarakatan desa. Selanjutnya ada perangkat desa yaitu para Kasi, Para Kadus serta unsur kemasyarakatan seperti LPM, RT, RW. TPK berjumlah berjumlah 6 orang, jika dalam pelaksanaan anggota TPK ini tidak ada tenaga ahli, maka Desa dapat merekrut pihak ketiga sebagai tenaga ahli atau konsultan, (2) Sarana prasarana penunjang pembangunan seperti hotmix, beton K250, campuran-campuran dolax, air pasir seta takaran semen, pengaspalan. (3) Anggaran yang tertuang sesuai (RAB) yang disusun oleh desa, serta sudah diverifikasi oleh tim verifikator di kecamatan. Lingkungan Kebijakan atau representasi dari lingkungan berupa: Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktornya.

Program SAMISADE diawali dengan sosialisasi kepada pemerintah pusat maupun kepada TPK. Para pemangku kepentingan berkomitmen mensukseskan program ini. Proposal SAMISADE disertakan dengan keabsahan kepemilikan tanah bahwa yang akan dibangun merupakan jalan desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Strategi yang dijalankan kecamatan ciawi yaitu dengan mengundang rapat khusus terkait SAMISADE, dengan melibatkan tenaga ahli dari DPMD dan Inspektorat agar dalam pelaksanaannya ada pemahaman bersama dari sisi perencanaan, persiapan tidak ada kendala secara administratif maupun pelaksanaan dilapangan sehingga hasil akhirnya bisa lebih optimal sesuai dengan perencanaan.

Karakteristik Lembaga

Pada karakteristik Institusi dan rezim yang berkuasa, Institusi yang menangani program SAMISADE dari mulai Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sampai ke kecamatan ciawi sepakat bahwa pelaksanaan program harus dilakukan secara profesional sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang sudah ada sesuai dengan visi program untuk kesejahteraan masyarakat desa. Tingkatan patuh serta responnya tim pelaksana. Pada tingkat patuh serta daya tanggap implementasi kebijakan program SAMISADE dilihat dari sudut pandang kecamatan, tingkat kecamatan berupaya mensosialisasikan program ke Desa, sebelum masyarakat mengajukan dan menyatakan titik lokasi pembangunan SAMISADE, di tingkat desa melakukan musyawarah dusun dengan seluruh kepala dusun selanjutnya di Desa mengadakan kembali musyawarah desa sehingga kemudian ditetapkan bahwa jalan tersebut akan ditetapkan untuk SAMISADE.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan dan daya tanggap di Desa berdasarkan dari informasi yang disampaikan dari Kecamatan. Dari sudut pandang Dinas DPMD Kabupaten Bogor, tingkat kepatuhan dan daya tanggap masyarakat sudah baik hanya masih ada beberapa data Pengajuan Desa untuk SAMISADE yang ditemukan kurang lengkap, sehingga ada pengembalian berkas yang harus diperbaiki. Tentu ini akan memakan waktu kembali dari yang seharusnya pengajuan bisa diselesaikan dengan cepat. Pada perspektif berikut, program SAMISADE adalah strategis. Karena keadaan dari desa di Kab. Bogor belum maksimal. Keadaan yang ada yaitu dalam batasan tertentu, bahkan sebagai titik lemah, yang disebabkan narasi miskin dan bodoh untuk sebuah desa. Infrastruktur dan SDM didalamnya menyebabkan desa menjadi pemiliki kekayaan Kab. Bogor tidak bisa diolah dengan baik, hingga masyarakat memilih berpindah ke kota (Yasin, 2020).

Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Ciawi

Pembangunan merupakan pertumbuhan, pertumbuhan sebagai kemampuan sebuah negara untuk berkembang dengan mencakup semua aspek kehidupan. Pembangunan merupakan serangkaian usaha yang sadar dilaksanakan dalam keadaan yang baik, menjadi dambaan masyarakat, dan pertumbuhan didalamnya dapat terjadi, dimana tidak muncul sendiri dan kebetulan, maka hal ini membutuhkan sebuah usaha nyata untuk dilaksanakan. Pembangunan sebagai sebuah rencana yang disusun dengan baik (Simbolon et al., 2021).

Kebijakan merupakan rangkaian aktivitas yang diusulkan individu, kelompok, ataupun pemerintah dalam sebuah lingkungan dengan disertai ancaman dan peluang, kebijakan yang menjadi usulan ini berfungsi memanfaatkan potensi dan menyelesaikan hambatan untuk dapat mendapatkan tujuannya (Nurdin & Rorimpandey, 2019). Hakikat pembangunan merupakan pembangunan masyarakat ataupun bangsa dengan menyeluruh, untuk mendapatkan kesejahteraan. Agar dapat terjadi pembangunan yang baik, SDM didalamnya harus memiliki pendidikan dan moral yang baik.

Agar pembangunan lebih efektif maka SDM harus mempelajari sejarah bangsa agar dapat belajar dari pengalaman agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Serta pembangunan yang adil yakni terdapat keadilan untuk manusia dan alam dengan tetap melestarikan lingkungan. Serta keadaan SDM dan SDA yang harus lebih baik maka pembangunan ini akan lebih baik dan dapat berkelanjutan (Simbolon et al., 2021). Singh dan Steinberg (Sadikin et al., 2021) menjelaskan jika pembangunan infrastruktur yang dipadukan dalam skala permukiman kota. Maka dibutuhkan studi kebijakan untuk pertimbangan kriteria dan indikator pembangunan yang baik berdasarkan dari kebijakan yang ada serta melaksanakan *feedback* untuk *stakeholder* agar menguji hasil kebijakan dari proses metodologi yang dipakai.

Dalam pembangunan infrastuktur Desa bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat, di tingkat kecamatan terutama untuk tahap perencanaan awal pembangunan

melalui Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Proses rencana pembangunan berasal dari usulan tiap desa. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ciawi dari adanya program SAMISADE menghasilkan beberapa pembangunan diantaranya pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), Betonisasi Jalan Desa, Pembangunan Drainase dan Saluran Irigasi, Pembangunan Jalan Desa dan Jembatan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari jumlah 13 Desa Kecamatan Ciawi semua Desa sudah melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan desa dengan jumlah 20 titik lokasi pembangunan. Dengan kondisi kontur tanah di Kecamatan Ciawi yang banyak berupa tebingan sehingga perlu penguatan dalam menstabilkan kondisi tanah pada tebingan maka dana pembangunan SAMISADE lebih banyak terserap untuk pembangunan (TPT).

Namun Salah satu wilayah Desa di Kecamatan Ciawi yang membangun TPT yaitu Desa Bendungan. Pembangunan TPT di Desa Bendungan ditemukan roboh setelah belum lama selesai dari jangka waktu pembangunannya. Kasus gagal konstruksi secara teknis di wilayah Kecamatan Ciawi ini sempat diperiksa oleh inspektorat dan dikaji, hasil kajiannya sudah dikoordinasikan dengan Tim Verifikasi UPT PUPR dan menyarankan untuk penanganan lanjutan yakni dengan dipasang selimut atau beton decking. Sehingga Kendala atau hambatan yang dihadapi kecamatan ciawi salah satunya yaitu desa-desa banyak yang bermasalah pada perencanaan hal ini terkait dengan pengerjaan oleh pekerja yang kurang memahami tentang konstruksi bangunan.

Dari segi perencanaan pada pembangunan belum menggunakan konsultan perencana dan masih direncanakan oleh desa sendiri sehingga ditemukan kasus gagal konstruksi. Selain itu pada SAMISADE tahun 2021 kurangnya koordinasi antar tim verifikasi dan masih lemahnya pengawasan. Pengawasan baru berjalan di tahap 2 saat pembangunan sudah berjalan 60%. Hal ini dimungkinkan pada SAMISADE awal tahun 2021 yang merupakan program baru, namun seiring berjalannya waktu dan adanya evaluasi dengan dikuatkan dengan peraturan bupati yang baru, sehingga berjalannya program SAMISADE lebih baik.

Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Program SAMISADE

Untuk penyelenggaraan layanan publik yang baik dibutuhkan untuk mengetahui perkembangan kinerja layanan publik dari instansi terkait yang menjadi penyelenggara melalui kegiatan menyusun indeks kepuasan masyarakat secara periodik. Indeks kepuasan ini menjadi ukuran dalam penilaian tingkat kualitas layanan dari pemerintahan. Dan dari data indeks yang ada bisa menjadi bahan untuk menilai unsur layanan yang harus diperbaiki dan dapat mendorong tiap unin pelayan agar dapat meningkatkan pelayanannya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur melalui Program SAMISADE yang telah dipaparkan akan bermuara pada masyarakat yang merasakan

langsung dampak dari kebijakan tersebut. Sebanyak 99 responden memberikan tanggapan pada variabel kepuasan masyarakat adalah sebagaimana yang tergambar pada tabel. Hasilnya menunjukkan bahwa dari unsur tersebut didapatkan hasil skor sebesar 91,23 artinya mutu pelayanan A dikategorikan SANGAT BAIK.

Tabel 2. (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat Per-Unsur Pelayanan

No	Unsur	NRR	Kinerja	Peringkat
1	Persyaratan	3,656	Sangat Baik	5
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,727	Sangat Baik	2
3	Waktu penyelesaian	3,606	Sangat Baik	8
4	Biaya/Tarif	3,676	Sangat Baik	3
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,737	Sangat Baik	1
6	Kompetensi Pelaksana	3,606	Sangat Baik	9
7	Perilaku Pelaksana	3,646	Sangat Baik	6
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,535	Sangat Baik	10
9	Sarana	3,636	Sangat Baik	7
10	Prasarana	3,666	Sangat Baik	4

Dari tabel 2 tersebut terlihat unsur dengan Nilai (NRR) tertinggi yaitu Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, (3,737). Sedangkan yang terendah yaitu Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan (3,535). Sedangkan pada Nilai Rata-Rata seluruh unsur >3,649 yang artinya penilaian masyarakat pada program SAMISADE di Desa-Desa Kecamatan Ciawi pada pelaksanaannya dianggap baik dan telah puas pada unsur tersebut. Akan tetapi unsur dalam NRR posisi 3 terendah harus ditingkatkan.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan Pembangunan Melalui Program SAMISADE pada tahun 2021 sebanyak 99% sudah terselesaikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan pengajuan yang diajukan oleh desa. Namun dari sisi pengawasan SAMISADE tahun 2021 masih kurang bahkan tidak adanya pengawasan sama sekali. Dari segi peraturan program yang berjalan pada tahun 2021 dinilai masih belum sama pemahaman antara masyarakat dengan regulasi yang sudah ada. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Ciawi dari 13 Desa yang mana semua Desa sudah melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan desa, dengan jumlah 20 titik lokasi pembangunan. Dengan kondisi kontur tanah di Kecamatan Ciawi yang banyak berupa tebingan maka dana pembangunan SAMISADE lebih banyak terserap pada pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT), untuk penstabilan keadaan tanah ditebing.

Pengawasan program SAMISADE di Kecamatan Ciawi sudah mulai diberlakukan di tahun 2021 pada saat pencairan tahap kedua serta kendala yang terjadi pada saat proses kegiatan pembangunan sudah diselesaikan sesuai aturan yang ada. Dari hasil pengolahan terhadap 99 kuesioner didapatkan dari pengukuran hasil skor Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) pada angka Indeks yakni 91,23 disimpulkan jika kinerjanya unit pelayanan pada mutu pelayanan A dikategorikan SANGAT BAIK, sebab berada di nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31 - 100,00. Unsur dengan Nilai (NRR) paling tinggi yakni Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, (rata-rata 3,737). Dan yang paling rendah yaitu Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan (rata-rata 3,535).

Implikasi teoritis pada penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan suatu kebijakan, aspek perencanaan memegang peranan yang sangat penting sehingga implementasi kebijakan dapat diperhitungkan secara matang. selain itu agar kebijakan berjalan efektif, maka regulasi yang ada perlu lebih diperhatikan tanpa banyak merevisi peraturan agar persoalan teknis tidak kerap terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berimplikasi pada kebijakan pembangunan infrastruktur pada program SAMISADE (a) Sosialisasi penyampaian program SAMISADE seyogyanya diinformasikan secara berkala agar kesalahan yang ada lebih terminimalisir.

Hasil temuan di lapangan, ditemukan bahwa masyarakat masih terdapat kesalahan administrasi dan lain-lain meski sudah ada perbup dan juklak juknis. (b) Tim Verifikasi dari Kecamatan Ciawi dan UPT PUPR agar lebih memaksimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta koordinasi antar tim verifikasi dan pendamping desa terhadap pelaksanaan SAMISADE. (c) Desa Penerima Bantuan Program SAMISADE agar dipastikan memiliki tenaga ahli atau konsultan perencanaan dan konsultan pengawas, hal ini untuk memastikan tidak terjadi kembali kesalahan konstruksi di kemudian hari yang menyebabkan kerugian material serta harus kembali dilakukan pengerjaan.

Saran dari hasil penelitian yaitu: (1) sebaiknya desa yang mendapatkan dana SAMISADE melaksanakan amanat dalam peraturan bupati yang sudah tertera mulai dari adanya konsultan perencana, serta konsultan pengawas agar pengerjaan pembangunan proyek SAMISADE lebih dapat termonitoring dan evaluasi juga berkaca pada kasus sebelumnya dimana bangunan yang roboh karena kurangnya tenaga ahli dalam memperhitungkan kualitas pembangunan dengan baik. (2) sebaiknya koordinasi serta komunikasi antar tim verifikasi dan antar tim pelaksana kegiatan lebih ditingkatkan. untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, (3) perlu adanya keterbukaan terhadap masyarakat tentang dana-dana apa saja yang didapatkan oleh Desa yang berguna dalam pembangunan bagi masyarakat, (4) saran pengembangan penelitian kedepan agar menggunakan variabel di luar kepuasan masyarakat serta disarankan untuk melakukan perluasan wilayah penelitian agar penelitian ini tetap bisa dilaksanakan jangka panjang pada program pemerintah sejenis yang menggunakan anggaran yang sangat besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Tui, F. P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(4), 850–868. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.504>
- AG, S. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar.
- Digdowniseiso, K. (2020). *Teori Pembangunan Daerah*.

- Iskandar, A. (2007). Analisis Praktik Manajemen Sumberdaya Keluarga dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten dan Kota Bogor. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(3), 81–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.5924>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*.
- Kependudukan, D., Sipil, D., & Situbondo, K. (2020). *Masyarakat*.
- Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Nurdin, I., & Rorimpandey, M. C. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Ppip) Di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 1–13. <https://doi.org/10.33701/jt.v1i1i1.630>
- R., N., & Maesaroh, N. (2014). Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Terhadap Kualitas Pelayanan Di Puskesmas Bandarharjo Di Kecamatan Semarang Utara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(2), 281–290.
- Ramadhan, D. P., & Paujiah, E. (2021). Pemberdayaan Desa melalui Peningkatan Infrastruktur di Kabupaten Bogor. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung, November*, 64–70.
- Rusliandy, R. (2022). Evaluasi Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(1), 127. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.629>
- Sadikin, S., Hannan, S., & Sunani, U. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulumanda. *Journal Peqguruang: Conference Series*, 3(2), 834. <https://doi.org/10.35329/jp.v3i2.2215>
- Sari, F. J., & Mardhiah, N. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Bukittinggi. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(4), 754–765. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.443>
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabilla, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1465>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Tanjung, F. M., & Fadhly, Z. (2022). Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(4), 727–740. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.448>
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Yasin, A. (2020). *Samisade, Membangun di Jantung Kabupaten Bogor*. Antara Megapolitan. <https://megapolitan.antaraneews.com/berita/124328/samisade-membangun-di-jantung-kabupaten-bogor>
-